



PROBLEMATIKA INTEGRASI MASYARAKAT MUSLIM-THAI DALAM NEGARA THAILAND

Supriati H. Rahayu^{1*)}, Taufik Nugroho²⁾, Muthmainnah³⁾, Difla Nadjih⁴⁾,
M. Parid⁵⁾, Nur Alfan Bahem⁶⁾

^{1,2,3,4)} Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, ^{5,6)} Mahasiswa UCY

¹⁾ supriatirahayu1@gmail.com ²⁾taufikn325@gmail.com, ³⁾inna.faiz@gmail.com, ⁴⁾ difnadjih@gmail.com, ⁵⁾mparid87@gmail.com, ⁶⁾nabahem28@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 28-01-2022	Diterima: 06-04-2022	Diterbitkan: 11-04-2022
----------------------	----------------------	-------------------------

abstract: The conflict between the Muslim-Thai community and the Royal Thai Government for quite a long time since the acquisition of Southern Thailand Muslim areas (Yala, Narathiwat, Pattani, Songkhla and Satun) from Britain into the Thai kingdom under the umbrella of the Anglo-Siamese Treaty 1909. This historical research intends to answer one question: why did the Muslim-Thai conflict with the Royal Thai Government drag on? As a result, the Thai Government's initial program was to build nationalism with a Buddhist state ideology through the use of the Thai language with the *Thai Rathaniyom* jargon, which means Thailand for the Thai people. Malay language is prohibited, Islamic educational institutions must follow national education standards. This is where the Muslim-Thai resistance begins. The resistance varied to voice the aspirations of Muslim-Thai residents in the South who wanted them to be given the authority to manage themselves.

Keywords: Integration, Muslim-Thai, Thailand, history

Abstrak: konflik masyarakat Muslim Thailand dengan Pemerintah Kerajaan Thailand telah berlangsung cukup lama sejak akuisisi Thailand Selatan daerah muslim (Yala, Narathiwat, Pattani, Songkhla dan Satun) dari Inggris ke dalam kerajaan Thailand di bawah payung Anglo-Siam Treaty 1909. Penelitian historis ini bermaksud menjawab satu pertanyaan tentang dampak dari problem implementasi kebijakan pendidikan bagi warga Muslim-Thai? Metode penelitian ini bersifat kualitatif, sumber data berupa data primer dan sekundair. Hasilnya, Program awal Pemerintah Thailand adalah membangun nasionalisme ber ideologi negara Buddhist melalui penggunaan bahasa Thai dengan jargon *Thai Rathaniyom* yang artinya Thailand untuk bangsa Thai. Bahasa Melayu dilarang, lembaga pendidikan Islam harus mengikuti standar pendidikan nasional. Dari sinilah perlawanan Muslim-Thai dimulai. Pemberian alternatif otonomi khusus bagi warga Muslim Thai, termasuk dalam pendidikan, menjadi alternatif penting bagi integrasi kewargaan Muslim-Thai secara menyeluruh.

Kata Kunci: Integrasi, Muslim-Thai, Thailand, sejarah

A. Pendahuluan

Thailand adalah salah satu negara besar di Asia Tenggara. Data *update* kependudukan mengatakan bahwa Thailand dihuni 66,2 juta Jiwa.¹ Thailand termasuk negara agraris dengan pekerjaan dan pendapatan utama penduduk berasal dari pertanian. Sistem pemerintahan menganut monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Negara ini berbatasan dengan; sebelah utara dengan Laos dan Myanmar, sebelah selatan dengan Malaysia dan Teluk Siam, sebelah timur dengan Laos dan Kamboja, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman.² Bahasa resmi Thailand adalah Thai, sementara bahasa lainnya yang digunakan adalah Inggris. Mata uang yang digunakan adalah bath. Lagu kebangsaan *Phleng Chat*. Thailand merupakan penghasil beras yang terbanyak di Asia Tenggara, sehingga disebut dengan “lumbung padi.”³ Nama lain Thailand adalah Siam yang berarti *abdi*.⁴ Sementara itu, penduduk Thailand selatan yang mayoritas muslim memperoleh julukan *kheik* yang berarti orang luar atau pendatang.⁵ Untuk selanjutnya penyebutan muslim Thailand selatan menggunakan istilah Muslim-Thai.

Dilihat dari sudut agama, mayoritas penduduk Thailand memeluk agama Budha (90%), sisanya 10% , pemeluk Islam, Katholik, Kong Hu Tju dan Hindu. Khusus pemeluk Islam berjumlah 4% atau 2,3 juta jiwa.⁶ Pemeluk Islam terkonsentrasi di Thailand Selatan yang menempati Propinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun.⁷ Wilayah tersebut dihuni oleh penduduk mayoritas muslim sunni sejak beberapa abad silam.

¹ Aslan, Hifza dan Muhammad Suhardi, Dinamika Pendidikan Islam di Thailand Abad 19-20, *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 No 1 2020. Hal. 38-54 ISSN: 2614-8013; <https://www.ceicdata.com/id/indicator/thailand/population>

² *Ibid.*, h. 3.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, h. 40.

⁵ Mikael Marasabessy, “Sejarah Pendidikan Islam Di Thailand” (*Makalah, Darussalam Gontor, 2013*), <https://www.academia.edu>.

⁶ Mayoosan Kaling, “Sistem Pendidikan Agama Islam di Pattani Thailand, Studi Kasus Sekolah Sasnasuksa”, *FAI, UMS, Surakarta, 2015*.

⁷ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 231.

Kapan Islam masuk ke Thailand selatan ? Para pakar sejarah sepakat mengatakan bahwa Islam masuk ke Thailand Selatan pada abad 16.⁸

Semenjak itu, Islam terus tumbuh dan berkembang mengakar di daerah tersebut. Para pemeluk Islam di wilayah tersebut mentransformasikan ajaran Islam kepada keturunannya dan masyarakat sekitarnya. Dalam jangka panjang, jadilah nilai-nilai Islam dan budaya yang mereka produksi secara terus menerus sebagai identitas yang melekat pada masyarakat Thailand Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, songkhla dan Satun). Pemeluk Islam di Thailand Selatan merupakan gabungan dari beberapa etnis, seperti Persia, Kamboja, Bengali, India, Pakistan, Cina dan Melayu. Sedangkan keturunan Melayu merupakan bagian terbesar muslim di Thailand.⁹ Oleh karena itu tidak berlebihan bila disebut mereka bagian dari Islam Nusantara yang membentang luas di seantero kawasan Asia Tenggara di masa-masa tersebut bersama kaum Melayu.¹⁰

Seiring dengan perjalanan waktu, upaya mengawetkan nilai-nilai Islam terus berjalan dalam masyarakat muslim Thailand Selatan. Upaya tersebut dalam bentuk pembelajaran Islam yang tumbuh dalam bentuk majlis ta'lim. Yang menarik dari proses tersebut yaitu alat komunikasi yang mereka gunakan, baik dalam keluarga maupun pada masyarakat umum, tak menggunakan bahasa Thai. Tetapi mereka menggunakan bahasa Melayu (Jawi).¹¹ Selain itu, bahasa Melayu juga dijadikan alat komunikasi pendidikan yang tumbuh di masyarakat tersebut. Faktor-faktor inilah yang kelak pada perkembangan berikutnya menjadi titik

⁸ Adinan Lahea, "Sejarah Masuk dan Berkenbangnya Dakwah Islam di Patani Selatan Thailand," *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2019*. Yala, Natarhiwats, Pattani dan Setun.

⁹ Abdul Matin Bin Salman, "Pemikiran dan Model Gerakan Islam Minoritas Thailand (Studi Antropologi-Fenomenologi)" *Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015*, 2.

¹⁰ taufik Nugroho et al., "Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (October 2021): 237-254.

¹¹ Mania, Perkembangan Sosial Islam di Thailand, *Al-Ma'arif*, "Jurnal Pendidikan Sosial Budaya, 1 No 1 2019.

krusial proses integrasi masyarakat Muslim-Thai dalam tubuh Negara Nasional Thailand.¹²

Sejauh ini masyarakat Muslim-Thai berada di Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Secara umum, mereka tak mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa Thai. Secara kultur, Bahkan, mengidentifikasi diri sebagai bangsa Melayu. Kultur Melayu sudah sedemikian rupa mendarah daging dalam tubuh masyarakat Thailand Selatan, sehingga kultur Melayu menjadi referensi etis dalam perilaku kehidupan mereka sehari-hari.¹³

Sementara itu, negara Thailand menghendaki agar seluruh komponen bangsa; ras, suku, agama dan budaya membangun komitmen kesetiaan kepada negara bangsa Thailand. Hal ini artinya setiap komponen masyarakat yang berada di wilayah negara Thailand, termasuk Muslim-Thai, meletakkan kesetiaan dan ketundukan tertinggi kepada negara bangsa. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa harus terintegrasi dalam satu kesatuan negara Thailand.¹⁴

Dalam sejarahnya, negara nasional tumbuh dan berkembang pada abad XIX mengglobal di seluruh dunia. Banyak wilayah di berbagai belahan dunia yang rakyatnya menyatakan diri merdeka dari penjajahan. Mereka memilih negara nasional atau *nation state* sebagai pilihan politiknya untuk mengatur dan mensejahterakan diri mereka sendiri. Prasyarat negara nasional adalah pluralitas masyarakat: agama, ras, suku, kesetaraan, non diskriminatif.

Istilah negara-bangsa yakni dua kata yang disejajarkan negara dan bangsa yang berarti mendudukkan dua kata tersebut sejajar. Hal ini membawa suatu pengertian bahwa suatu negara tidak mungkin hadir tanpa ikatan berasama dari dari berbagai suku, ras, agama dalam suatu ikatan bangsa. Komponen bangsa yang beragama disatukan dalam suatu

¹² Hamdi Salaebing, "Kebijakan Politik Pemerintah Thailand Terhadap Komunitas Muslim, (Studi Kasus Respon Pengurus Masjid Al-Hidayah Al-Islamiah Dalam Pendirian Sekolah Melayu/Tadika Di Wilayah Patani Thailand Selatan)", *Thesis Univ. Islam Negeri Lampung, 2018*.

¹³ Ibid.

¹⁴ Salah satu bentuk kebijakan tersebut yaitu melarang penggunaan bahasa Melayu di Thailand Selatan. Mania, "Perkembangan" h. 51.

wadah yang bernama negara. Lebih jauh, *nation-state* atau negara-bangsa pada dasarnya ialah kehidupan modern yang menolak bentuk kehidupan lama.

Bentuk kehidupan ini berwujud kemandirian secara politik (*self-rule*) dengan ciri: mengelola diri sendiri, setiap warga bangsa memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, serta hak dan kewajiban yang sama. Dalam negara bangsa terdapat banyak agama, suku, ras dan budaya atau dikenal dengan nama pluralitas. Semua agama, suku, ras dan budaya harus menyatu terintegrasi dalam satu kesatuan negara nasional. Semua kelompok tersebut harus melebur diri dan mendukung terhadap negara nasional. Jika ada sekelompok orang yang membelot dari kerangka di atas, maka pembelotan tersebut dalam segala bentuknya adalah wujud ketidaksetiaan sekaligus penghianatan terhadap kehidupan bersama dalam negara nasional. Oleh karena itu, kelompok tersebut harus disatukan dalam kehidupan nasional dan jika tidak bersedia, maka dilakukan amputasi secara politik maupun militer.

Secara teoritis, konsep negara nasional dapat dikelompokkan menjadi dua garis besar yaitu negara nasional integrasi dan negara nasional *civil society*. Negara Nasional integrasi adalah konsep negara nasional yang menghendaki agar komponen bangsa yang berupa ras, agama, budaya melebur diri *ajur-ajer* dalam kebersamaan. Lebih jauh, konsep ini mengatakan masing-masing komponen tersebut harus rela melepas identitas diri dan kelompoknya serta ineterest atau kepentingannya yang bersifat kelompok harus disatukan dalam tujuan bersama. Nasionalisme jenis ini meminta kesetiaan tertinggi anggota masyarakat adalah pada negara.

Dengan kata lain negara nasional di atas mengandung pengertian bahwa masyarakat berusaha menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara berbasis pada satu identitas bersama sekelompok orang yang memiliki tujuan atau cita-cita sama untuk mewujudkan kepentingan nasional.

Sementara itu, negara nasional *civil society* adalah sebuah konsep negara nasional berbasis pada keragaman masyarakat dalam hal agama,

budaya, aspirasi politik. Pendapat negara nasional jenis ini berdasar pada 2 (dua) asumsi tentang terbentuknya masyarakat. Asumsi pertama mengatakan bahwa dalam struktur suatu masyarakat manapun dibangun dari berbagai macam ras, budaya, etnis, agama. Keragaman tersebut mengisyaratkan bahwa suatu konstruksi sosial terbentuk secara alamiah yang menggambarkan pluralitas. Asumsi kedua mengatakan bahwa keragaman tersebut tak dapat disenyawakan atau *ajur-ajer* atau luluh dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, keragaman tersebut dirawat dan dihargai eksistensinya sebagai sebuah aset yang berharga suatu masyarakat.

Dalam kerangka kebersamaan di Indonesia, keragaman dalam suatu masyarakat diikat dalam kesatuan yang dituangkan dalam frasa *Bhinneka Tunggal Ika*. Dengan kata lain, konsep negara nasional *civil society* menekankan pada upaya membangun kebersamaan dengan menghargai akan eksistensi kelompok tanpa menghilangkan identitasnya. Paradigma negara nasional *civil society* menekankan pada pentingnya kesadaran untuk menyumbang demi pembangun rumah bersama.

Secara faktual, fenomena sosio-politik di Thailand Selatan adalah situasi konflik antara penduduk Muslim-Thai dengan Negara Thailand yang memegang teguh ideologi Negara Buddha. Dalam perspektif sejarah, konflik ini terjadi seiring dengan peluasan wilayah kerajaan Thailand ke wilayah Selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun). Dengan perluasan tersebut, Thailand Selatan resmi ke bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan Thailand pada tahun 1909. Pada tahun itu dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang mencabut hak-hak dan martabat Muslim Thailand Selatan.¹⁵ Akibatnya, muncul aksi-aksi perlawanan kaum minoritas muslim dan terus berlanjut sampai sekarang bahkan semakin agresif.¹⁶ Perlawanan tersebut ditanggapi pemerintah pusat

¹⁵Mania, Perkembangan, h. 49. Konflik tersebut terjadi setelah diserahkannya wilayah utara Melayu oleh pemerintah colonial Inggris kepada kerajaan Siam. Saat itu dibuatlah Traktat Anglo-Siam yang mencabut hak-hak dan martabat Muslim Pattani.

¹⁶ Ibid. Isi tractat tersebut: "Menghapus kekuasaan raja-raja melayu serta menepatkan wilayah Patani bukan lagi sebagai sebuah kerajaan melayu yang merdeka dan bertaulat (*Kingdom Of Patani Malay*)".

sebagai separatisme, hingga diberlakukan darurat militer di wilayah tersebut.

B. Metode

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosio historis. Karena itu kajian literature menjadi pokok penting dalam penelitian ini. sumber data berupa data primer dan sekundeir. Data primer: kebijakan pemerintah Kerajaan Thailand, respon Muslim-Thai. Data sekunder berupa jurnal disertasi, thesis hasil-hasil penelitian terdahulu tentang kehidupan warga muslim di Thailand selatan.

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk menyatukan wilayah secara sosiologis, politik dan kenegaraan kerajaan Thailad telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan sejak penyerahan wilayah dari pendudukan Inggris. Wilayah dengan masyarakat Muslim menjadi perhatian tersendiri dalam implementasinya. Hal demikian terwujud dalam kebijakan integrasi wilayah maupun pendidikan dan aspek kehidupan warga negara lainnya.

Integrasi

Pada tahun 1909, Inggris melakukan perjanjian dengan Kerajaan Thailand (Siam) yang kemudian dikenal dengan nama *Anglo-Siam Treaty*. Poin terpenting perjanjian tersebut adalah penyerahan Thailand Selatan yang terdiri dari Propinsi Yala, Pattani, Narathiwat, Satun dan Songkhla menjadi bagian dari kerajaan Thailand.

Situasi politik internasional saat itu dimana ekspansi kolonialisme Barat, terutama Perancis semakin kokoh di Asia Tenggara, hal ini mendesak Kerajaan Thailand melakukan modernisasi administrasi agar kendali pemerintah berjalan efektif dan membangun nasionalisme.¹⁷ Sedang program pembangunan nasionalisme diperlukan untuk menjadikan Thailand semakin kokoh, karena Kerajaan Thailand mewarisi kerajaan-kerajaan yang lemah secara ekonomi dan rapuh secara militer.¹⁸

¹⁷ Paulus Rudolf Yuniarto, "Minoritas Muslim Thailand, Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme" *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7 No.1 Tahun 2005., h. 11.

¹⁸ Ibid.

Yang dimaksud dengan pembangunan nasionalisme adalah program yang menghendaki agar rakyat Thailand termasuk kelompok minoritas Melayu muslim atau Muslim-Thai, Monks dan China agar memberikan kesetiaan tunggal kepada negara Thailand. Adapun yang dimaksud dengan warisan berharga bangsa Thai adalah agama Buddha dan bahasa Thai.¹⁹ Kedua kebijakan tersebut mendesak dilakukan untuk menghadang lajunya kolonialisme Barat di Asia Tenggara yang semakin kokoh.

Kebijakan integrasi ini tak membuahkan hasil maksimal bagi masyarakat Muslim-Thai. Ada beberapa kendala mengapa kebijakan tersebut dinilai gagal oleh pemerintah kerajaan Thai. Pertama, alat-alat birokrasi negara termasuk SDM yang dibangun di Thailand Selatan, sama sekali tak mengenal kultur sejati Muslim-Thai yang berorientasi pada agama Islam dan ras Melayu. Kedua, banyak pejabat birokrasi negara dikirim dari pemerintah pusat. Putra daerah sama sekali tidak tampil dalam masyarakatnya sendiri. Ketiga, kebijakan pemerintah pusat terutama pada era Perdana Menteri Pibun Songgram dinilai sangat rasis yakni membuat jargon terkenal yaitu *Thai Rathaniyom*.²⁰ Akhirnya banyak program-program pembangunan di Thailand selatan yang mangkrak dan masyarakat menjadi penonton pembangunan bahkan memperoleh perlawanan dari masyarakat dalam bentuk apatisisme. Lebih dari itu, masyarakat Thailand Selatan secara ekonomi stagnan dan serasa menumpang hidup di negeri sendiri dengan pengawasan ketat dari pusat.

Program integrasi sosial ekonomi, politik dan agama di atas menimbulkan kemarahan masyarakat muslim di banyak tempat Thailand Selatan. Berbagai bentuk perlawanan minoritas muslim terutama menghidupkan kembali identitas Melayu Islam atau Pan Malaya

¹⁹ Ibid., h. 13. Penggunaan bahasa Thai diwajibkan oleh pemerintah, baik itu di kantor kerajaan, pemerintah, sekolah dan media. Dan ternyata strategi pemerintah Thailand memang membuahkan hasil. Dalam waktu sekitar 50 tahun, banyak generasi muda Melayu Muslim lebih suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka 'dipaksa' keluarga untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika mereka berkumpul di lingkungan keluarga.

²⁰ *Thai Rathaniyom* artinya Thailand untuk bangsa Thailand.

bergaung dimana-mana. Lebih jauh, mereka tak bersedia tunduk kepada pemerintah pusat yang Ultra Nasionalis.²¹

Dalam hal ini kelompok pengajian atau pendidikan sejenis pondok pesantren memainkan peran yang signifikan sebagai motor penggerak perlawanan.²² Majelis ta'lim atau Pesantren merupakan lembaga pendidikan khas dalam masyarakat muslim Nusantara yang tak lekang waktu. Di Negara Malaysia, Brunei atau kawasan masyarakat muslim Melayu lainnya, lembaga ini telah warisan penting yang semakin eksis di era sekarang. Di Indonesia, pesantren bahkan telah menjadi sorotan penting bagi penyebaran kehidupan bernegara dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³

Pembangunan bidang Hukum dan Pendidikan

Pemerintah kerajaan Thailand sangat menyadari pentingnya memperoleh dukungan dari masyarakat muslim Thailand Selatan dan menyadari pula kegagalan pendekatan kepada masyarakat muslim melayu oleh sejumlah pejabat. Pada tahun 1945 dan seterusnya pemerintah Kerajaan Thailand membuat program sebagai berikut: 1. *Petronage of Islam Act* atau undang-undang perlindungan terhadap masyarakat muslim. Usulan ini datang dari Pridi Banomyong, dan senator Muslim dari Bangkok, Cham Promyong. Berdasarkan undang-undang tersebut para ulama, majelis-majelis masjid, madrasah, dan *chularjjaamontri* (dewan ulama pemerintah),²⁴ diintegrasikan dalam administrasi pemerintahan Kerajaan Thailand.

Selain program hukum sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah Kerajaan Thailand melakukan program pembangunan pendidikan.

²¹ Yuniarto, *Minoritas*, h. 14.

²² *Ibid.*

²³ Taufik Nugroho, "Ideologi Pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Tenggara Solokuro Lamongan," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2020): 97–112; Ahmad Nadjib H. et al., "Penanaman Nilai-Nilai Kemasyarakatan Di Pesantren Modern," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 17–32; Taufik Nugroho, "Ma'had Al-Zaytun Artikulasi KeIslaman Dan KeIndonesiaan Di Pendidikan Pesantren," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 2020): 133–148.

²⁴ *Chularajjamontri* adalah suatu dewan yang mengurus masalah-masalah orang-orang Islam. Lembaga ini didirikan tingkat nasional bertugas untuk memberikan masukan kepada pejabat kerajaan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama dan pemeluk Islam.

Harapannya agar, konflik yang bersifat ideologis di masyarakat Thailand Selatan berkurang dengan intervensinya pemerintah kepada lembaga-lembaga bidang pendidikan Islam.²⁵ Salah satu program pendidikan adalah pemerintah menawarkan program perbaikan pendidikan pondok tahun 1961. Adapun tujuannya yaitu untuk mengubah lembaga tersebut menjadi lembaga pelopor perubahan sosial dan modernisasi pembangunan. Bentuk kongkrit program tersebut yaitu mentransformasikan pondok sebagai lembaga pendidikan swasta menjadi sekolah-sekolah yang tunduk kepada peraturan pemerintah. Namun respon masyarakat Muslim-Thai sangat negatif. Program tersebut tak lebih hanya ingin menjadikan pondok bergerak dari institusi agama menjadi institusi pendidikan yang secara tak langsung mengurangi peranan agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan kata lain, program pembangunan pendidikan dari pemerintah memiliki agenda tersembunyi. Yakni, menjadikan anak-anak muslim Thailand Selatan tercerabut dari akarnya dan tak lagi melawan pemerintah Kerajaan beserta kebijakan-kebijakannya.

Berikut ini kami kutipkan salah satu tanggapan warga Muslim-Thai terhadap kebijakan pemerintah Kerajaan bidang pembangunan pendidikan;

“Pihak pemerintah hanya mensiasati keinginan politik melalui jalur pendidikan, dengan terselip suatu harapan bahwa peserta didik melayu muslim mempelajari pengetahuan agama dan umum (dengan disisipi budaya buddhis) akan melahirkan *out put* yang dapat mengapresiasi ideologi dan falsafah bangsa Thai, sehingga dapat mungurangi ekstrimitas nasionalisme Melayu yang masih menjadi momok pemicu disintergrasi teritorial negara Thai.”²⁶

Ada satu pertanyaan penting untuk dijawab yaitu mengapa pemerintah kerajaan Thailand yang memiliki *political will* dengan berbagai program yang ditawarkan kepada Muslim-Thai ditolak ? Jawabnya kurang lebih sebagai berikut: tujuan utama pembangunan

²⁵ Ibid., h.16.

²⁶ Kaling, “Sistem” h. 12.

adalah integrasi seluruh masyarakat Thailand termasuk muslim minoritas di Thailand Selatan dalam tubuh Negara Thailand. Lebih jauh, harapannya agar Muslim-Thai bersedia berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan pendidikan serta berbagai kegiatan kenegaraan yang lain. Namun karena perbedaan mendasar konsep ideologi dan tuntutan kesetiaan terhadap negara Buddhis. Selain itu, pemeluk Buddha dimata muslim adalah penyembah patung atau berhala, di mana berhala adalah musuh nomor satu dalam akidah Islam. Kedua perbedaan mendasar tersebut dinilai banyak orang menjadi kendala utama integrasi masyarakat Muslim-Thai dalam tubuh negara Thailand.

Perlawanan minoritas muslim kepada pemerintah Kerajaan Thailand bukan semata faktor ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan yang sudah cukup lama berlangsung. Apa yang mereka inginkan? Mereka menghendaki agar pemerintah pusat memberikan *otonomi khusus* kepada masyarakat muslim Thailand Selatan “Biarkan kami mengurus diri kami sendiri, semacam GAM di Indonesia,” kata mereka.

D. Penutup

Proses integrasi masyarakat muslim Thailand atau Muslim-Thai kedalam tubuh negara Thailand mengalami sejumlah kendala. Secara sederhana, kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kendala ideologis, kultural dan pragmatik. Sejumlah perlawanan Muslim-Thai dalam bentuk budaya, politik dan militer kepada pemerintah kerajaan Thailand berdasar pada ketiga problem akut di atas.

Sejauh data yang ada, saran penting bagi pengembangan masyarakat Muslim-Thai tetap dalam kerajaan Thailand perlu diuraikan. Pemerintah Kerajaan Thailand perlu memberikan kewenangan kepada mereka untuk *self-rule* atau kekuasaan mengatur diri sendiri. Hal yang bisa menaikkan kepercayaan diri Muslim-Thai sebagai warga negara Kerajaan Thailand karena telah memiliki keistimewaan pada negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Aslan, Hifza dan Muhammad Suhardi. "Dinamika Pendidikan Islam di Thailand Abad 19-20," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 No 1 2020. h. 38-54.
- Bin Salman, Abdul Matin. "Pemikiran dan Model Gerakan Islam Minoritas Thailand (Studi Antropologi-Fenomenologi)" *Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015.*
- H., Ahmad Nadjib, Muh. Jamaluddin, Hilman Haroen, Taufik Nugroho, and Paiman Paiman. "Penanaman Nilai-Nilai Kemasyarakatan Di Pesantren Modern." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (June 2019): 17–32.
- Hayipiyawong, Naeem. The Demand of Political Right, Studi Kasus Otonomi Khusus Wilayah Status Malay-Muslim Patani Thailand Selatan, Master Thesis, *Master of International Relations Study Program, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.*
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Kaling, Mayoosan. *Sistem Pendidikan Agama Islam di Pattani Thailand, Studi Kasus Sekolah Sasnasuksa*, FAI, UMS, Surakarta, 2015.
- Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma. Masyarakat Muslim Thailand dan Dampak Psikologis Kebijakan Asimilasi Budaya, *Jurnal Hisbah, Vol. 13, No. 1, Juni 2016.*
- Lahea, Adinan. "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Dakwah Islam di Patani Selatan Thailand," *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2019.*
- Mania, Perkembangan Sosial Budaya, *Al-Ma'arif : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol 1 No 1 2019, hlm. 49.*
- Marasabessy, Mikael. "Sejarah Pendidikan Islam Di Thailand" (Makalah, Darussalam Gontor, 2013), <https://www.academia.edu>.
- Haque, Marissa Grace, Nelmidia, Vidiyanna Rizal Putri, Denok Sunarsi, Rr Vemmi Kesuma Dewi, "Islam Datang dan Menetap di Thailand", *Didaktika: Jurnal Kependidikan, Vol. 8, No. 3, Agustus 2019.*
- Nugroho, Taufik, Cipto Sembodo, Ibroheem Ha, Muhammaridwan Lehnuh, and Usman Madami. "Penyebaran Islam Di Nusantara Antara Kultur Dan Struktur." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (October 2021): 237–254.
- Nugroho, Taufik. "Ideologi Pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Tenggara Solokuro Lamongan." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2020): 97–112.
- . "Ma'had Al-Zaytun Artikulasi Keislaman Dan KeIndonesiaan Di Pendidikan Pesantren." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 2020): 133–148.
- Salaebing, Hamdi. *Kebijakan Politik Pemerintah Thailand Terhadap Komunitas Muslim* (Studi Kasus Respon Pengurus Masjid Al-Hidayah Al-iIslamaiyah Sekolah Melayu/Tadika di Wilayah Pattani, Thailand Selatan), *Fakultas Usuludin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.*

**Problematika Integrasi Masyarakat Muslim-Thai
Dalam Negara Thailand**

Scupin, Raymond. *Muslim-Thai In Bangkok, Islam and Modernization in a Buddhist Society*, Ph.D Thesis, Univ. California, Santa Barbara, 2008.

Yuniarto, Paulus Rudolf. "Minoritas Muslim Thailand, Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme" *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 7 No.1 Tahun 2005.

**SH. Rahayu, T Nugroho, Muthmainnah, D Nadjih
M. Parid, NA Bahem**